

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BPK Jateng Gelar Media Workshop

Semarang, Rabu (26 Agustus 2015) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menggelar acara *media workshop* dengan rekan-rekan media massa di wilayah Provinsi Jawa Tengah. *Media workshop* merupakan kegiatan yang salah satu tujuannya untuk mempererat silaturahmi BPK dengan awak media yang juga *stakeholder* BPK. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang kelas lantai II BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pukul 08.30 WIB-selesai. Acara ini dimaksudkan sebagai sarana komunikasi informal antara BPK dengan kalangan praktisi media massa di Jawa Tengah.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, **Hery Subowo, S.E., MPM., Ak., CIA., CFE.** menyampaikan kedudukan, dan peran BPK. Sumber mandat BPK berdasarkan Amandemen III UUD 1945 dan didukung dengan empat paket undang-undang keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2005 dan UU No. 15 Tahun 2006.

Tugas pemeriksaan yang dilakukan BPK yaitu:

1. Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang hasilnya berupa opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer), serta Tidak Wajar (adverse).

Sasaran pemeriksaan keuangan yaitu kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2014 perolehan opini pemerintah daerah, yaitu WTP sejumlah 12 entitas dan WDP sejumlah 24 entitas.

2. Pemeriksaan kinerja yang menghasilkan temuan, simpulan dan rekomendasi. Sasaran pemeriksaan berupa aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang menghasilkan simpulan. Sasaran pemeriksaan yaitu kesesuaian asersi dengan kriteria.

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, pemerintah wajib melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP). Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut tersebut wajib diserahkan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) diterima. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga memantau pelaksanaan TLRHP tersebut, diantaranya dengan menyelenggarakan forum pembahasan dan pemantauan TLRHP per semester di kantor Pudak Payung, Semarang.

Media memiliki peran penting dalam memantau pengelolaan keuangan negara yaitu melalui pemberitaan yang ditulisnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang efektif antara BPK dengan media massa dalam mewujudkan tujuan BPK sebagai sebuah lembaga negara yang mandiri, berintegritas, dan profesional dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel sehingga dapat mendorong terwujudnya keadilan sosial.